



Urgensi Kebijakan Digitalisasi Terjemah Kitab Suci Bahasa Daerah dalam Pelestarian Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya tak Benda

The Urgency of Digitizing Local Language Scriptures in Preserving Local Languages as Intangible Cultural Heritage

Rita Zumara*

Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan (PBAL2K), BMBPSDM
Kementerian Agama

Penulis Korespondensi: rita.zumara@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	23 – 6 – 2025	28 – 7 - 2025	10 – 8 - 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Digitalisasi Terjemah Kitab Suci;
Dokumentasi Bahasa Terancam Punah;
Kolaborasi Lintas Sektor;
Literasi Budaya;
Pelestarian Bahasa;
Pendidikan Berbasis Kurikulum;
Revitalisasi Bahasa Daerah;
Teknologi Inovatif;
Tafsir dan Terjemah

Abstrak

Policy paper ini membahas kebijakan dalam pelestarian bahasa daerah di Indonesia dari ancaman kepunahan akibat berbagai faktor, seperti migrasi, sikap penutur, serta dominasi bahasa nasional dan internasional karena bahasa daerah memiliki peran penting dalam identitas budaya dan sistem pengetahuan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah melalui potensi penerapan teknologi digital sekaligus meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, menggunakan metode kualitatif kajian kebijakan dengan pendekatan analisis SWOT, serta evaluasi berbasis skoring. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan digitalisasi terjemahan Kitab Suci dapat memperluas akses masyarakat terhadap literasi keagamaan berbasis bahasa daerah, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi yaitu (1) keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, (2) perbedaan visi dan prioritas berbagai lembaga dalam proses kolaborasi, (3) resistensi dari institusi yang kurang siap, (4) menjaga kualitas implementasi digitalisasi serta (5) berkelanjutan pendanaan. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan beberapa perbaikan, antara lain: (1) Identifikasi bahasa daerah yang membutuhkan digitalisasi dan sumber daya yang tersedia. (2) Pengembangan platform digital, sehingga lebih kaya dan berdaya guna. (3) Meningkatkan literasi digital dengan menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi di komunitas lokal untuk memudahkan adopsi teknologi; (4) Mengintegrasikan program dengan kebijakan nasional (5) Menyediakan solusi *offline* untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet.

Keywords

Digitization of Qur'anic Translations;
Endangered Language Documentation;
Cross-Sector Collaboration;
Cultural Literacy;

Abstract

This policy paper discusses policies in the preservation of local languages in Indonesia from the threat of extinction due to various factors, such as migration, speaker attitudes, and the dominance of national and international languages because local languages have an important role in cultural identity and community knowledge systems. This paper aims to discuss the importance of policies that support the preservation of local languages through the potential application of digital technology while increasing people's religious understanding,

Language Preservation; Curriculum-Based Education; Regional Language Revitalization; Innovative Technology; Interpretation and Translation using a qualitative method of policy review with a SWOT analysis approach, as well as a scoring-based evaluation. The results show that although the policy of digitizing translations of the Holy Scriptures can expand public access to regional language-based religious literacy, there are still some weaknesses that need to be overcome, namely (1) limited digital infrastructure in remote areas, (2) differences in the vision and priorities of various institutions in the collaboration process, (3) resistance from less prepared institutions, (4) maintaining the quality of digitization implementation and (5) sustainable funding. Therefore, this paper recommends several improvements, including: (1) Identification of local languages that require digitization and available resources. (2) Development of digital platforms, so that they are richer and more powerful. (3) Improve digital literacy by organizing training, socialization in local communities to facilitate technology adoption; (4) Integrate programs with national policies (5) Provide offline solutions to overcome internet network limitations.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bahasa daerah merupakan salah satu warisan budaya yang paling berharga. Keberagaman bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa, karena bahasa merupakan identitas, manifestasi praktik budaya, sistem pengetahuan, dan kohesi sosial dari satu kelompok masyarakat budaya. Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak kedua setelah Papua Nugini (840 bahasa daerah). Tercatat dalam petabahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa daerah di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan (Bahasa dan Petabahasa di Indonesia, t.t.).

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari situs *Web Ethnologue* pada tahun 2023, *Languages of the World*, salah satu situs yang otoritatif dan banyak dikutip oleh linguist, mencatat bahwa bahasa yang digunakan di dunia berjumlah 7.168. Namun demikian, 40 persen lebih bahasa dunia kini dalam keadaan terancam (*endangered*) (Hardyanto, 2025). Pengguna suatu bahasa kerap tinggal kurang dari 1.000 penutur. Bahkan disebutkan bahwa terdapat 24 bahasa daerah di Indonesia tidak lagi memiliki penutur atau jumlah penuturnya *zero*. Diperkirakan pada akhir abad ke-21, lebih dari setengah bahasa daerah di Indonesia akan punah. Menurut data BPS, dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2010 hingga 2020 sedikitnya bahasa Sunda kehilangan 2 juta penuturnya (profil-suku-dan-keragaman-bahasa-daerah-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020, t.t.; UNESCO: Setiap Dua Minggu, Satu Bahasa Daerah Punah di Dunia, t.t.).

Kepunahan bahasa daerah ini disebabkan semakin menurunnya jumlah penutur dari sebuah bahasa daerah oleh faktor-faktor *nonlinguistic* (Campbell & Belew, 2018) dalam bab pengantar pada buku *Cataloguing the World's Endangered Languages* yang dapat disampaikan dalam 2 faktor utama.

Faktor pertama, migrasi dan sikap penutur. Faktor ekonomi, disebut sebagai faktor yang mendorong adanya migrasi penduduk dalam pola pencarian nafkah, kemudian diikuti faktor sikap penutur bahasa daerahnya, penutur tidak lagi menggunakan dan mewariskan ba-

hasanya kepada generasi berikutnya sebagai akibat komunikasi dengan kawasan luar dan selain juga disebabkan oleh bahasa nasional resmi dan bahasa dominan yang mengelilinginya (Tondo, 2009).

Faktor kedua, adalah faktor dominasi bahasa nasional dan internasional sebagai dampak faktor kelembagaan, politik dan sosial dalam era modernisasi, kemajuan teknologi dan globalisasi. Sejak tahun 1928, ketika bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia, pengaruhnya terhadap berbagai bahasa daerah sudah mulai dirasakan. Pengaruh ini semakin menguat pada tahun 1945, saat bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan statusnya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam konteks formal, seperti dalam acara kenegaraan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Dominasi bahasa Indonesia yang begitu kuat telah memicu pergeseran bahasa (*language shift*) di berbagai wilayah, sehingga banyak bahasa daerah mengalami penurunan penggunaan. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat, bahasa Indonesia kini menjadi bahasa utama, menggantikan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Demikian pula dengan bahasa internasional (bahasa Inggris). Penting adanya sebuah bahasa sebagai alat komunikasi secara internasional. Dan secara suka atau tidak suka, bahasa Inggris telah menjadi alat komunikasi secara global. Pergeseran fungsi inilah kemudian secara perlahan menggeser penggunaan bahasa daerah dari penuturnya.

Faktor utama kelembagaan politik dan sosial yang menyebabkan dominasi bahasa adalah minimnya pembinaan, revitalisasi dan pelestarian bahasa daerah dari pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan kebudayaan terkait yang dapat mendorong upaya preservasi dan konservasi bahasa daerah untuk mempertahankan, meningkatkan dan perubahan sikap penutur suatu bahasa daerah dalam proses pewarisan dan pengembangan bahasa daerah pada generasi berikutnya yang adaptif, selaras dan relevan dengan perkembangan era modernisasi, kemajuan teknologi dan globalisasi. Sebuah tantangan di tengah minimnya penggunaan teknologi informasi pada yang justru di awal menjadi faktor punahnya bahasa daerah.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), transformasi di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi Badan Moderasi Beragama dalam PMA Nomor 33 tahun 2024, dan mempengaruhi organisasi, dan hilangnya tugas dan fungsi khazanah keagamaan dari Puslitbang Lektur, dan telah beralih nama menjadi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan.

Dalam rencana strategis kementerian agama tahun 2025 -2029 ditetapkan 3 misi utama kementerian agama yaitu pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dua dari tiga misi utama ini berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan. (Renstra Kemenag (30Dec24), t.t.)

Untuk dapat mewujudkan salah satu tujuan strategis kementerian agama: (1) Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat

untuk kemaslahatan bangsa; (2) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif; (3) Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau; maka upaya penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa daerah dan proses digitalisasi serta distribusinya adalah upaya untuk mendekatkan umat dengan kitab sucinya hingga terwujud umat yang baik, toleran dan penuh dengan kedamaian, serta menjaga kearifan lokal berupa bahasa daerah yang semakin hari semakin terancam kepunahannya. Hal ini juga sangat mendukung upaya penguatan literasi keagamaan yang dapat memperkaya wawasan umat terhadap kitab sucinya.

Digitalisasi bahasa daerah menjadi fokus utama berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui platform, seperti: BASAbali Wiki dan BASAsulsel Wiki. Proyek - proyek ini menunjukkan bagaimana dokumentasi berbasis teknologi dapat membantu pelestarian bahasa daerah.

Studi kasus *Hans Rausing Endangered Languages Project* juga memberikan wawasan tentang peran lembaga internasional dalam mendukung pelestarian bahasa yang hampir punah. Proyek ini, didanai oleh *Arcadia Fund*, telah berhasil menciptakan kamus digital dan materi audio-visual untuk bahasa Meher dan Woirata di Maluku Barat. Dengan pendekatan berbasis komunitas, proyek ini tidak hanya mendokumentasikan bahasa tetapi juga melatih masyarakat lokal untuk aktif menggunakan bahasa mereka.

Kemendikbudristek juga telah mem-prakarsai program Merdeka Belajar untuk revitalisasi bahasa daerah, menargetkan 100 bahasa hingga 2025. Program ini mengintegrasikan pendidikan berbasis teknologi dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya bahasa daerah. Langkah ini melibatkan digitalisasi materi ajar dan pengembangan platform pembelajaran daring untuk menjangkau lebih banyak penutur muda (Kemdikdasmen, t.t.).

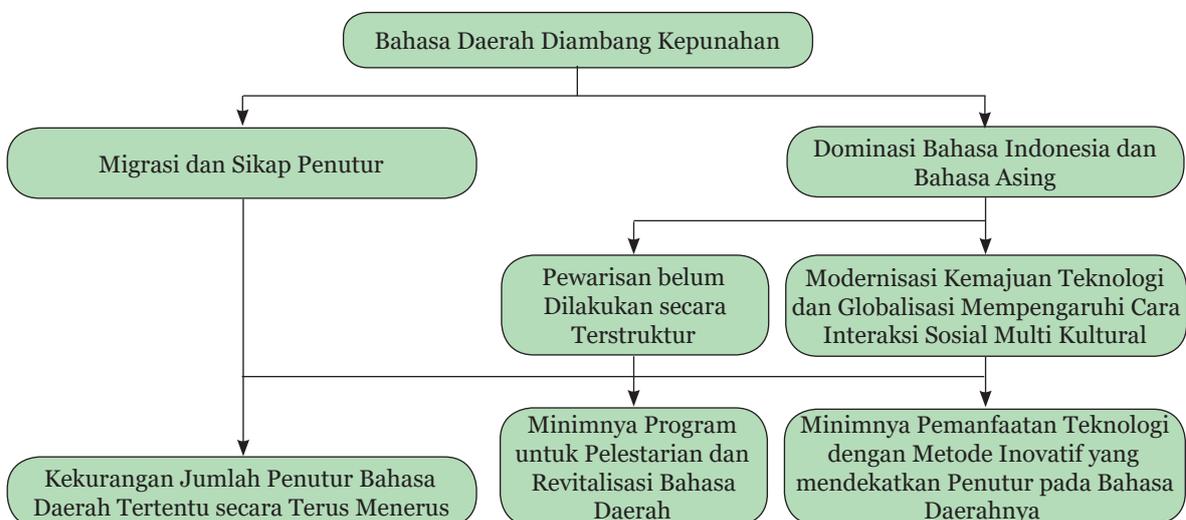
Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dalam pelestarian bahasa daerah untuk menyelamatkan dari kepunahan di Indonesia antara lain:
 - Penurunan jumlah penutur bahasa daerah secara drastis, dan sikap penuturnya pada generasi selanjutnya
 - Tercatat lebih dari 40% bahasa di dunia terancam punah.
 - Di Indonesia, 24 bahasa daerah tidak lagi memiliki penutur.
 - Bahasa Sunda kehilangan sekitar 2 juta penutur dalam satu dekade (2010–2020).
 - Penutur tidak lagi mewariskan bahasa ibu karena tekanan komunikasi lintas daerah dan dominasi bahasa nasional.
2. Bahasa daerah tidak lagi menjadi bahasa utama dalam keluarga dan komunitas.
 - Dominasi bahasa nasional dan internasional

- Bahasa Indonesia dan Inggris secara perlahan menggantikan fungsi bahasa daerah dalam pendidikan, media, dan ruang publik.
3. Status resmi bahasa Indonesia mempercepat pergeseran bahasa di berbagai wilayah.
 - Minimnya program revitalisasi dan pelestarian dari lembaga formal
 - Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan budaya belum optimal dalam menjalankan program revitalisasi bahasa.
 4. Terjadi kelemahan dalam pembinaan dan integrasi bahasa daerah ke dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
 - Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelestarian bahasa
 - Bahasa daerah belum banyak terdokumentasi atau dikembangkan dalam bentuk digital (*e.g.* kamus digital, aplikasi, AI).
 5. Teknologi justru menjadi faktor penyebab kepunahan karena bahasa daerah tertinggal dalam ekosistem digital.
 - Tidak optimalnya integrasi bahasa daerah dalam strategi literasi keagamaan
 - Terjemahan kitab suci dalam bahasa daerah belum sepenuhnya dijadikan instrumen untuk memperkuat keagamaan berbasis lokal.
 - Literasi kitab suci dalam bahasa ibu memiliki potensi besar namun belum dijadikan bagian dari kebijakan prioritas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka *problem statement* terkait revitalisasi pelestarian bahasa daerah di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan warisan bahasa sebagai kekayaan bangsa, adalah: *Pertama*, menurunnya jumlah penutur bahasa daerah karena faktor migrasi dan sikap para penutur yang menghambat proses pewarisan bahasa daerah ke penutur muda. *Kedua*, minimnya program pelestarian dan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan kebudayaan terkait. *Ketiga*, minimnya pemanfaatan teknologi dengan metode inovatif dan relevan.



Tujuan dan Manfaat Kebijakan

Tujuan Kebijakan

Pembangunan bidang agama memiliki tujuan peningkatan kualitas umat beragama dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara moderat dan kerukunan umat beragama untuk kemaslahatan bangsa, dan melalui peran pelestarian, revitalisasi serta pemanfaatan teknologi dengan metode inovatif terjemah kitab suci bahasa daerah untuk meningkatkan jumlah penutur bahasa daerah untuk mendukung penyelamatan bahasa daerah yang berada diambang kepunahan dan mendekatkan masyarakat dengan kitab sucinya.

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang langsung mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan digitalisasi terjemah kitab suci yang memanfaatkan teknologi yang inovatif dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama. Secara lebih spesifik, kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterlibatan penutur muda dalam penggunaan bahasa daerah melalui aksesibilitas digital yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
2. Mendorong peningkatan kuantitas penutur bahasa daerah dengan menyediakan sumber daya berbasis teknologi yang dapat diakses secara luas.
3. Memperkuat peran pendidikan agama dalam pelestarian budaya dengan mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam materi pembelajaran berbasis keagamaan.
4. Menyediakan fondasi strategis untuk pelestarian bahasa daerah dengan memanfaatkan teknologi modern untuk dokumentasi, distribusi, dan promosi.

Manfaat Kebijakan

- Bagi Penutur Muda: Memberikan akses mudah ke sumber daya berbasis bahasa daerah, yang memungkinkan mereka untuk belajar dan menggunakan bahasa tersebut secara aktif.
- Bagi Kuantitas Penutur Bahasa Daerah: Menyediakan platform digital yang mendorong peningkatan jumlah pengguna bahasa daerah di berbagai kalangan.
- Bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan: Menyediakan materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan.
- Bagi Pelestarian Bahasa Daerah: mendukung pengembangan kebijakan berbasis teknologi untuk dokumentasi dan distribusi bahasa daerah secara berkelanjutan.

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Kerangka teori kebijakan yang langsung mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan digitalisasi terjemah kitab suci yang memanfaatkan teknologi yang inovatif dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama ini dapat dibangun dari beberapa landasan teori dan konsep, antara lain:

1. Teori Kebijakan Publik

- Teori Rasional (*Rational Choice Theory*) Teori ini membahas tentang bagaimana kebijakan publik dirumuskan berdasarkan analisis rasional untuk memaksimalkan manfaat dengan meminimalkan biaya, dan berfokus pada efisiensi dan efektivitas serta menggunakan data dan analisis kuantitatif.
- Teori implementasi kebijakan. Teori ini membahas bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penerjemahan bahasa daerah, model *hybrid bottom up* dan *up to down*. Puslitbang Lektur melakukan FGD untuk melakukan proses identifikasi, pembahasan dan rekomendasi bahasa-bahasa yang akan digunakan. Para pimpinan terkait akan membahas usulan bahasa daerah (scoring) dan merekomendasikan bahasa-bahasa yang akan digunakan. Kemudian akan melibatkan komunitas bahasa daerah, mufassir lokal dalam tim penerjemahan dan validasi untuk memastikan akurasi dari terjemahan.

2. Teori dokumentasi “*Framework for Endangered Languages Documentation*” oleh Himmelmann untuk memastikan sistematisitas dalam pencatatan, pelestarian, dan penyebaran bahasa daerah (Himmelmann, 1998).

Digitalisasi bahasa daerah adalah proses pengumpulan, pengarsipan, dan distribusi konten berbasis bahasa daerah melalui teknologi digital. Menurut teori revitalisasi bahasa, langkah ini efektif jika didukung dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek pendidikan, budaya, dan teknologi. Dalam hal ini, terjemahan kitab suci ke dalam bahasa daerah bukan hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah di berbagai lapisan masyarakat.

Kerangka Konseptual

Kajian ini berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah digitalisasi konten, yang melibatkan pengubahan terjemahan kitab suci ke format digital untuk akses luas. Pilar kedua adalah integrasi pendidikan, yaitu memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum berbasis teknologi untuk menjangkau generasi muda. Pilar ketiga adalah kolaborasi lintas sektor, yang bertujuan menyinergikan peran pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam pelestarian bahasa daerah.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Selain itu, penulis juga menggunakan metode SWOT ((*Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman)) untuk menganalisis kebijakan yang langsung mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan digitalisasi terjemah kitab suci yang memanfaatkan teknologi

yang inovatif dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut.

Metode pengumpulan data dalam makalah ini melalui inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Langkah awal ini juga mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis.

Proses pengolahan data dimulai dengan tabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan meng-evaluasi berdasarkan kriteria.

Pemilihan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh *keyperson* berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menaruh perhatian besar pada revitalisasi bahasa daerah melalui program “Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah” yang diluncurkan pada 22 Februari 2022. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah dengan metode pembelajaran klasikal dan non-klasikal, dengan target revitalisasi 100 bahasa daerah hingga 2025 melalui tiga model pendekatan berdasarkan tingkat keterancaman bahasa (model A, B, dan C). Badan Bahasa, melalui platform pemetaan bahasa daerah, mendokumentasikan bahasa yang terancam punah dan mengadakan festival serta lomba untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan generasi muda terhadap bahasa daerah (Kemdikdasmen, t.t.).

Selain itu, upaya pendokumentasian bahasa daerah juga didukung oleh organisasi internasional dan komunitas lokal, seperti *Hans Rausing Endangered Languages Project* dan *DoBeS Project*, yang berhasil menciptakan kamus digital untuk bahasa Meher dan Woirata. Kemendikbudristek juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun kurikulum dan buku pelajaran bahasa daerah, meliputi digitalisasi materi ajar, pelatihan guru, dan sosialisasi program ke masyarakat.

Di sisi lain, transformasi di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, termasuk perubahan nomenklatur hingga 2024, menyesuaikan fokus pada moderasi beragama dan pengembangan SDM. Perubahan ini berpengaruh pada struktur organisasi dan tugas terkait khazanah keagamaan.

Namun, hasil survei PISA 2019 menunjukkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, yang hanya mencapai 0,1% menurut UNESCO.



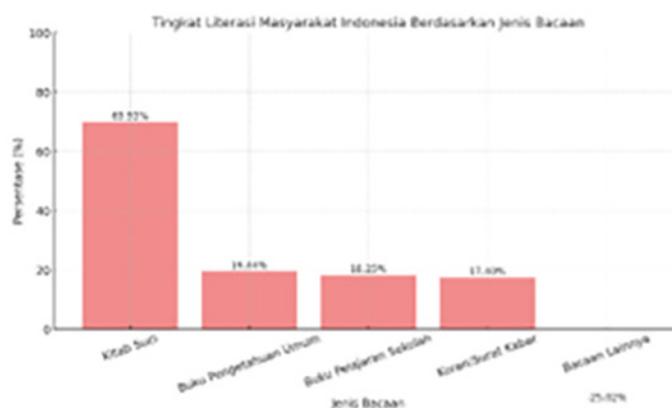
Sumber: Hasil Survei PISA, 2019

Hal ini disebabkan minimnya kebiasaan membaca sejak dini, baik melalui buku fisik, digital, maupun sumber lainnya, sehingga aktivitas membaca belum dianggap menyenangkan.

Keseluruhan upaya revitalisasi bahasa daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran budaya, memperkuat identitas nasional, dan mendorong minat baca generasi muda dalam mendukung keberagaman bahasa dan literasi di Indonesia.

Di era digital saat ini, meskipun akses informasi semakin mudah, banyak anak justru kecanduan bermain game atau menonton konten yang tidak sesuai usia, sehingga waktu mereka dihabiskan di depan layar tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung literasi. Akibatnya, otak menjadi pasif, dan keinginan untuk berpikir atau membaca menurun. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Pada 2018, indeks literasi penduduk berusia lima tahun ke atas sebesar 77,94% (*statistik-sosial-budaya-2018*, t.t.) dan meningkat menjadi 87,78% pada 2021. (*statistik-sosial-budaya-2021*, t.t.)

Data tingkat literasi masyarakat Indonesia berdasarkan jenis bacaan, serta data literasi kitab suci berdasarkan jenis kelamin, lingkungan tinggal, pendidikan dan usia tersebut disajikan pada tabel berikut.



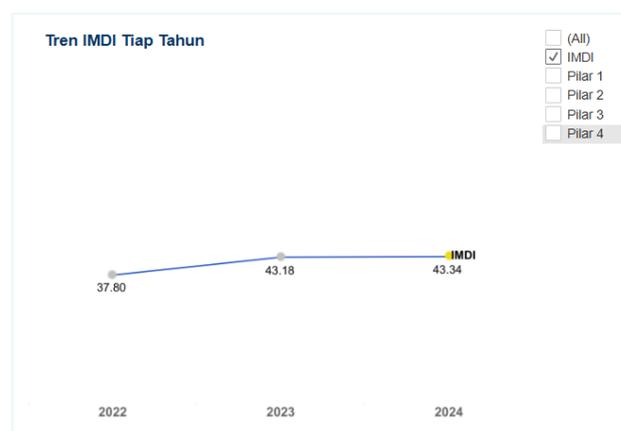
Sumber: Data Survei Nasional Sosial Budaya, BPS, 2021

Lektor menyadari beberapa hal tersebut ikut mengambil peran dalam revitalisasi bahasa daerah melalui program penerjemahan kitab suci ke berbagai bahasa daerah di Indonesia. Dari tahun 2010 hingga saat ini, ada 30 terjemah kitab suci ke bahasa daerah Makassar, Ka-

ili, Sasak, Minang, Dayak Kayanatn, Banyumasan, Toraja, Bolaang Mongondow, dan Batak Angkola (2015); Malayu Ambon, Bali, dan Banjar dan Lampung (2017); Bugis, Aceh dan Madura (2018); Rejang (2019). Osing (2022), dan Malayu Jambi, Tolaki, Cirebon, Gayo, dan Bima (2023). Betawi, Dayak ngaju, Ternate, dan Melayu Kupang.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, penerjemahan kitab suci berbahasa daerah telah terdokumentasikan secara digital dan tersedia melalui platform aplikasi berbasis Android, seperti Qur'an Kemenag, yang merupakan Qur'an digital resmi Kementerian Agama.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Komdigi, menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2022 hingga 2024 dengan skor masing-masing 37,81, 43,18, dan 43,34. (*13122024_Buku IMDI Bab 1-5_V10,t.t.;Buku_Publikasi_IMDI_2022_ID,t.t.; Data IMDI Nasional tahun 2022 - 2024, t.t.; Final IMDI 2023_R1-1, t.t.*) dengan 4 pilar data (infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan).



Sumber: Data Survei IMDI, Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2022-2024 (<https://imdi.sdmdigital.id/home>)

Peningkatan indeks ini mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara lebih efektif setiap tahunnya.

Digitalisasi kitab suci dengan berbagai bahasa, fitur, dan konten yang sarat nilai keagamaan ini dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memberikan edukasi berbasis teknologi informasi. Langkah ini bertujuan mendekatkan masyarakat dengan kitab suci secara inovatif. Selain itu, program ini mendukung penguatan kesalehan umat beragama melalui optimalisasi media digital dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama di berbagai daerah.

Dalam memahami kitab suci secara komprehensif, tafsir memainkan peran penting dengan memberikan pemahaman yang lebih kaya dibandingkan terjemahan sederhana. Tafsir memperhatikan konteks, bahasa, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (kitab suci), sehingga menjadi alat yang wajib untuk mendalami kompleksitas dan keindahannya. Oleh karena itu, penerjemahan tafsir *tahlili* dan *wajiz* ke dalam bahasa daerah menjadi kebutuhan mendesak.

Tafsir dan terjemahan Al-Qur'an dapat dilengkapi sebagai fitur tambahan pada aplikasi Qur'an digital Kemenag untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Kementerian Agama untuk memanfaatkan teknologi digital guna mening-

katkan literasi keagamaan masyarakat, memperkuat pemahaman Al-Qur'an (kitab suci), dan memperluas aksesibilitas konten Islami di era digital.

Kemudian dari sisi legalitas, penggunaan bahasa daerah sebagai hak masyarakat dan di lingkungan pemerintahan belum mempunyai kerangka hukum yang kuat. Oleh karena itu, ada kebutuhan hukum secara yuridis berupa undang - undang yang mengatur bahasa daerah secara komprehensif integral. Kementerian Agama melalui Puslitbang Lektur dalam hal penerjemahan kitab suci terjemah bahasa daerah sendiri belum ada regulasi sebagai payung hukum untuk landasan dan perlindungan yang mengatur pelaksanaan penerbitan, digitalisasi dan penerjemahan kitab suci bahasa daerah. Namun, kerangka regulasi dan implementasinya belum memadai sehingga belum memenuhi pemenuhan kebutuhan hukum bahasa daerah. Kebutuhan hukum bahasa daerah menjadi penting terkait hak asasi manusia dan tanggung jawab negara atas kebahasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam bentuk undang-undang untuk mengatur bahasa daerah.

ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan untuk mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan digitalisasi terjemah kitab suci, yang memanfaatkan teknologi inovatif dan relevan, berdasarkan empat perspektif utama:

1. Substansi kebijakan

Substansi kebijakan harus mencakup aspek pelestarian bahasa daerah dengan fokus penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa daerah yang terancam punah, melalui penyediaan terjemah kitab suci dalam format cetak dan digital yang mudah diakses.

2. Instrumen kebijakan

- Alokasi anggaran khusus untuk program penerjemahan bahasa daerah.
- Kemitraan dengan lembaga keagamaan, universitas, dan komunitas lokal.
- Bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan penggunaan teknologi seperti AI (Kecerdasan buatan) untuk mempercepat proses terjemahan dan pelafalan.
- Puslitbang Lektur telah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap penerjemahan kitab suci 28 bahasa daerah.

3. Proses pembentukan kebijakan

Pembentukan kebijakan ini harus melibatkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, dengan langkah-langkah berikut:

- Melibatkan ahli bahasa dan budaya daerah, ulama, akademisi, komunitas bahasa daerah, lembaga keagamaan, dan pengembang teknologi untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang ada, untuk memastikan relevansi dan kelayakan implementasi.
- Kajian akademik yang mendalami hubungan antara penurunan jumlah penutur

bahasa daerah, kebutuhan masyarakat, dan tingkat literasi digital masyarakat.

- Melibatkan komunitas lokal untuk memastikan kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pembentukan kebijakan harus mengacu pada peraturan yang sudah ada, seperti Pasal 32 UUD 1945 tentang penghormatan dan perlindungan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, UU No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan ini mengatur upaya pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, termasuk bahasa daerah, dengan memperkuat aspek digitalisasi (PP Nomor 57 Tahun 2014, t.t.).

4. Dampak penerapan kebijakan

- Positif:
 - 1) Meningkatkan jumlah penutur bahasa daerah yang terancam punah dan dapat dihidupkan kembali melalui penyediaan konten berbasis teknologi melalui teks keagamaan.
 - 2) Membantu masyarakat memahami nilai-nilai agama melalui bahasa ibu mereka.
 - 3) Konten digital memungkinkan distribusi lebih luas dibandingkan media cetak tradisional.
- Negatif:
 - 1) Ketergantungan pada infrastruktur teknologi, yang mungkin terbatas di daerah tertentu.
 - 2) Risiko penyalahgunaan atau plagiarisme konten digital tanpa perlindungan hukum yang memadai.
 - 3) Strategi Mitigasi: menyediakan akses *offline*, melibatkan komunitas lokal, dan membangun kerangka perlindungan data serta HAKI.

5. Perspektif masalah yang diidentifikasi

- Perlu analisis lebih mendalam terhadap penurunan jumlah penutur bahasa daerah, faktor-faktor sikap penutur dan dominasi bahasa nasional dan internasional perlu diidentifikasi.
- Perlu analisa terhadap program-program revitalisasi bahasa daerah saat ini yang masih fokus pada pendidikan formal, mengintegrasikan program penerjemahan ini dengan kurikulum pendidikan lokal dan pelatihan komunitas. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk merubah sikap dari penutur bahasa ke arah yang positif.
- Perlu dikaji lebih lanjut pemanfaatan teknologi informasi yang tepat untuk mendukung optimalisasi pelestarian bahasa daerah dan mendukung dokumentasi bahasa daerah. Pemanfaatan aplikasi berbasis AI untuk penerjemahan saat ini sudah

sangat membantu, namun khusus untuk penerjemahan kitab suci bahasa daerah perlu pengembangan lebih lanjut.

Adapun salah satu instrumen pendekatan analisis kebijakan mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan digitalisasi terjemah kitab suci, yang memanfaatkan teknologi inovatif dan relevan yang dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan) sebagai faktor internal yang mendukung keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - Pelestarian budaya: Mendukung keberlangsungan bahasa daerah dengan menjadikannya bagian dari dokumen religius yang penting.
 - Kemudahan akses: Digitalisasi memungkinkan masyarakat luas, terutama generasi muda, untuk mengakses terjemahan dalam format yang mudah digunakan.
 - Dukungan keagamaan: Terjemahan kitab suci menjadi media yang dapat memperkuat pengajaran agama Islam secara lokal.
 - Inklusivitas: Memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan latar belakang bahasa daerah untuk memahami kitab suci lebih baik.
2. *Weaknesses* (kelemahan) sebagai faktor internal yang menghambat keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - Kesulitan teknis: Penerjemahan ke dalam bahasa daerah yang beragam membutuhkan ahli bahasa, ulama, dan teknologi yang mumpuni.
 - Pendanaan: Proses digitalisasi dan penerjemahan memerlukan biaya besar.
 - Bahasa langka: Bahasa daerah yang hampir punah atau tidak memiliki sistem tulisan bisa sulit diterjemahkan.
3. *Opportunities* (peluang) sebagai faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - Teknologi berkembang: Pemanfaatan AI dan teknologi digital untuk mempercepat proses digitalisasi dan kemudian divalidasi oleh tim ahli bahasa dan budaya daerah, ulama/mufassir.
 - Minat internasional: Bahasa daerah yang diintegrasikan dengan teks religius dapat menarik perhatian lembaga internasional untuk pendanaan.
 - Revitalisasi bahasa: Meningkatkan kesadaran dan penggunaan bahasa daerah.
4. *Threats* (ancaman) sebagai faktor eksternal yang dapat mengganggu keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - Kontroversi keagamaan: Risiko perbedaan interpretasi kitab suci di antara kelom-

pok masyarakat.

- Kurangnya dukungan masyarakat lokal: Tidak semua masyarakat mungkin menerima atau tertarik pada inisiatif ini.
- Isu teknis: Ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital di daerah terpencil.

Untuk memudahkan analisis, hasil identifikasi faktor-faktor di atas dapat diringkas dalam matriks SWOT sebagai berikut:

Faktor Internal/ Eksternal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi SO (<i>Maxi-Maxi</i>)	Strategi WO (<i>Mini-Maxi</i>)
	a. Memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat digitalisasi terjemah Al-Qur'an dalam bahasa daerah, kemudian divalidasi oleh tim ahli bahasa dan budaya daerah, ulama/ <i>mufasir</i>	a. Mengadakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat lokal yang kurang terbiasa menggunakan teknologi
	b. Mengembangkan kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan aplikasi interaktif berbasis bahasa daerah	b. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran dan infrastruktur teknologi di daerah terpencil
	c. Melibatkan komunitas lokal untuk menghasilkan konten berbahasa daerah yang relevan	c. Mengintegrasikan kebijakan digitalisasi ke dalam program nasional, seperti Merdeka Belajar dan literasi digital
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi ST (<i>Maxi-Mini</i>)	Strategi WT (<i>Mini-Mini</i>)
	a. Memanfaatkan dukungan internasional untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya lokal yang terbatas	a. Mengembangkan kebijakan perlindungan hak cipta untuk mencegah penyalahgunaan konten digital bahasa daerah
	b. Mendukung masyarakat tentang pentingnya pelesarian bahasa daerah untuk meminimalkan resistensi terhadap inovasi	b. Meningkatkan sinergi lintas sektor untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih terstruktur dan efektif
	c. Menggunakan teknologi berbasis <i>offline</i> untuk mengatasi tantangan konektivitas di daerah terpencil	c. Membangun pusat data terintegrasi untuk mendokumentasikan bahasa daerah secara sistematis dan berkelanjutan

Berdasarkan matriks SWOT di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*): Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:
 - Implementasi Teknologi AI: Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menerjemahkan kitab suci secara otomatis ke dalam berbagai bahasa daerah. dan kemudian divalidasi oleh tim ahli bahasa dan budaya daerah, ulama/*mufassir*.
 - Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Gandeng perusahaan teknologi untuk menciptakan aplikasi yang mendukung pembelajaran bahasa daerah dengan fitur audio, video, dan interaktivitas.
 - Partisipasi Komunitas Lokal: Libatkan komunitas lokal untuk menghasilkan dan mengelola konten berbasis bahasa daerah.
2. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*): Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang:

- Pelatihan Literasi Digital: Lakukan pelatihan intensif kepada masyarakat lokal, khususnya di daerah terpencil, untuk mengadopsi teknologi digital.
 - Peningkatan Infrastruktur Tekno-logi: Dorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur digital, seperti akses internet yang stabil, di daerah pedesaan.
 - Integrasi Program Nasional: Gabungkan kebijakan digitalisasi bahasa daerah ke dalam program nasional seperti Merdeka Belajar dan literasi digital.
3. Strategi ST (*Strengths-Threats*): Menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman:
- Kolaborasi Internasional: Manfaatkan dukungan dari organisasi internasional untuk mendanai dan mempromosikan program digitalisasi bahasa daerah.
 - Edukasi tentang Pentingnya Bahasa Daerah: Adakan kampanye kesadaran untuk menekankan pentingnya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya.
 - Aplikasi *Offline*: Kembangkan aplikasi berbasis offline untuk mengatasi tantangan akses internet di daerah terpencil.
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*): Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman:
- Perlindungan Hak Cipta: Bangun regulasi perlindungan hak cipta untuk melindungi konten bahasa daerah dari penyalahgunaan.
 - Pusat Data Bahasa Daerah: Buat pusat data nasional untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan semua bahasa daerah secara sistematis.
 - Sinergi Lintas Sektor: Tingkatkan kerja sama antara pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi kebijakan.

Dengan melakukan analisis SWOT yang komprehensif (pembobotan dilakukan penulis pada lampiran), pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas kebijakan mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan digitalisasi terjemah kitab suci, yang memanfaatkan teknologi inovatif dan relevan sehingga tujuan untuk pelestarian bahasa daerah dan pembangunan bidang agama dapat tercapai.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya dan diberikan skoringnya pada lampiran I dan II, maka kebijakan-kebijakan berikut adalah sebagai alternatif : (a) Integrasi terjemah kitab suci dalam Media Pendidikan, adalah paling cocok untuk memberikan dasar pendidikan pelestarian bahasa daerah kepada generasi muda secara berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur sekolah dan pelatihan guru. Integrasi ini memerlukan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga pendidikan swasta untuk mempercepat implementasi, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas; (b) Kolaborasi Antar-Lembaga sebagai upaya pelestarian bahasa daerah dengan

cakupan yang luas akan melibatkan berbagai pihak, di mana keberhasilannya memerlukan mekanisme koordinasi yang transparan dan efisien. Kebijakan ini juga membutuhkan penguatan kapasitas lembaga dan penerapan teknologi digital untuk mengatasi tantangan birokrasi dan meningkatkan transparansi; (c) Digitalisasi penerjemahan kitab suci bahasa daerah dengan teknologi inovatif dan relevan dengan melibatkan komunitas bahasa, tokoh agama dan budaya, ulama, pengembang teknologi Informasi. Alternatif kebijakan ini mendapatkan skor paling tinggi dari dua alternatif kebijakan sebelumnya dan memiliki potensi besar sebagai kebijakan yang dapat direkomendasikan karena memanfaatkan peluang digitalisasi yang sangat relevan dengan kebutuhan masa kini. Kemudian untuk mengatasi permasalahan jumlah penutur bahasa, Program Revitalisasi Bahasa Daerah, Kesenjangan Akses Informasi, dan Kurangnya Minat Generasi Muda, dapat dilakukan dengan:

1. Berkurangnya penutur bahasa daerah:
 - Dengan dokumentasi digital, bahasa daerah dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Teknologi juga membuka akses yang lebih luas ke bahasa daerah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di luar daerah asalnya.
2. Terbatasnya penerapan program revitalisasi bahasa daerah di suatu wilayah:
 - Platform digital dapat menjadi media pembelajaran mandiri untuk mempelajari bahasa daerah.
 - Pembuatan konten baru yang relevan, seperti aplikasi atau permainan edukasi berbasis bahasa daerah.
3. Kesenjangan akses informasi:
 - Teknologi informasi mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Bahasa daerah juga bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi populer, seperti navigasi atau asisten virtual, sehingga penggunaannya menjadi lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kurangnya Minat Generasi Muda: Inovasi digital dapat menarik perhatian generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi. Fitur-fitur interaktif, seperti audio, video, dan animasi, dapat meningkatkan minat mereka untuk mempelajari bahasa daerah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis kebijakan dan alternatif kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait kebijakan pelestarian bahasa daerah melalui digitalisasi terjemah kitab suci Kementerian Agama dengan teknologi yang inovatif dan relevan bahwa kebijakan ini pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk meningkatkan aksesibilitas konten berbasis teknologi melalui teks keagamaan yang inovatif untuk meningkatkan jumlah penutur bahasa daerah yang terancam punah. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh beberapa permasalahan krusial, yaitu:

1. **Infrastruktur Teknologi:** Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi.
2. **Koordinasi Lintas Sektor:** Kesulitan dalam menyelaraskan visi dan prioritas berbagai lembaga dapat memperlambat proses kolaborasi.
3. **Resistensi terhadap Perubahan:** Perubahan kebijakan, terutama dalam integrasi pendidikan, dapat menghadapi resistensi dari institusi yang kurang siap.
4. **Sumber Daya Manusia:** Kebutuhan akan tenaga ahli dalam bahasa daerah dan teknologi digital menjadi tantangan untuk menjaga kualitas implementasi.
5. **Pendanaan berkelanjutan:** ketergantungan pada anggaran yang memadai untuk memastikan program dapat berjalan secara konsisten dalam jangka panjang.

Rekomendasi

Menteri Agama membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pelestarian bahasa daerah melalui digitalisasi terjemah kitab suci dengan teknologi yang inovatif dan relevan (dengan skor tertinggi pada lampiran I sebesar 8.05), dengan melibatkan unsur pemerintah pusat (Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kemendikti Saintek, Kemenbud, dan Kementerian Komdigi), pemerintah daerah, komunitas bahasa, tokoh agama dan budaya, ulama, pengembang teknologi informasi.

REFERENSI

- 13122024_Buku IMDI Bab 1-5_V10. (t.t.).
Bahasa dan Petabahasa di Indonesia. (t.t.). <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/>
Buku_Publikasi_IMDI_2022_ID. (t.t.).
Campbell, L., & Belew, A. (Ed.). (2018). *Cataloguing the world's endangered languages*. Routledge.
Data IMDI Nasional tahun 2022—2024. (t.t.). <https://imdi.sdmdigital.id/home>
Final IMDI 2023_R1-1. (t.t.).
Hardyanto. (2025, Januari 10). *Merdeka Belajar untuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang Terancam*. <https://setkab.go.id/merdeka-belajar-untuk-revitalisasi-bahasa-daerah-yang-terancam/>
Himmelman, N. P. (1998). *Documentary and descriptive linguistics*. *Linguistics*, 36(1). <https://doi.org/10.1515/ling.1998.36.1.161>
Kemendikdasmen. (t.t.). *Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah*. <https://www.youtube.com/watch?v=nkzI9h5nnAE>
PP Nomor 57 Tahun 2014. (t.t.).
Profil-suku-dan-keragaman-bahasa-daerah-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020. (t.t.).
Renstra Kemenag (30Dec24). (t.t.).
Statistik-sosial-budaya-2018. (t.t.).

Statistik-sosial-budaya-2021. (t.t.).

Tondo, F. H. (2009). Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah: Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik. 11(2).

UNESCO: Setiap Dua Minggu, Satu Bahasa Daerah Punah di Dunia. (t.t.). <https://jabarprov.go.id/berita/unesco-setiap-dua-minggu-satu-bahasa-daerah-punah-di-dunia-12944>

LAMPIRAN I

Alternatif Kebijakan	Efektivitas Pelestarian Bahasa	Dukungan Implementasi	Keterjangkauan Biaya	Inovasi dan Relevansi Teknologi	Dukungan Pemangku Kepentingan	Total Skor
	30%	25%	20%	15%	10%	100,00%
Alternatif 1: Digitalisasi Terjemah Al-Qur'an dengan Teknologi Inovasi	9	8	5	5	8	
	2.7	2	1.2	1.35	0,8	8,05
Alternatif 2: Integrasi Terjemah Al-Qur'an dalam Media Pendidikan	8	8	7	6	7	
	2.4	7	1.4	0,9	0.7	7,4
Alternatif 3: Kolaborasi Antar-lembaga	7	9	8	7	9	
	2.1	2.25	1,8	1,05	0,9	7,9

LAMPIRAN II

Acuan Rekomendasi Alternatif Kebijakan

Alternatif 1: (Digitalisasi Terjemah kitab suci bahasa daerah dengan teknologi inovatif dan relevan)

Untuk menilai rekomendasi Puslitbang Lektur dalam membuat kebijakan digitalisasi terjemah kitab suci bahasa daerah dengan teknologi inovatif dan relevan, dapat menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Dunn. Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan skoring:

1. Efektivitas Pelestarian Bahasa (30%): apabila teknologi mempermudah dokumentasi dan distribusi bahasa daerah secara luas. Skor 9
2. Dukungan Implementasi (25%), komunitas teknologi dan investor untuk mengembangkan teknologi dan infrastrukturnya yang relevan dan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Skor 8
3. Keterjangkauan Biaya(20%), dukungan biaya untuk mengembangkan dan pemeliharaan sistem dalam teknologi informasi. Skor 6
4. Inovasi dan Relevansi Teknologi(15%), adopsi teknologi kekinian. Skor 9
5. Dukungan Pemangku Kepentingan (10%), pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas bahasa, tokoh agama dan budaya, ulama, pengembang teknologi Informasi. Skor 8

Berdasarkan kerangka analisis dan skoring di atas, dapat direkomendasikan kepada Puslitbang Lektur Kementerian Agama untuk mengadopsi alternatif kebijakan digitalisasi terjemah kitab suci bahasa daerah dengan Teknologi Inovatif dan relevan dengan melibatkan komunitas bahasa, tokoh agama dan budaya, ulama, pengembang teknologi Informasi. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan Survei Awal: Identifikasi bahasa daerah yang membutuhkan digitalisasi dan sumber daya yang tersedia.
2. Pengembangan Platform Digital: Gunakan database Qur'an Kemenag untuk *supporting* data pada platform AI yang dilengkapi fitur teks, audio, dan visual bahasa daerah.
3. Meningkatkan Literasi Digital: Selenggarakan pelatihan, sosialisasi di komunitas lokal untuk memudahkan adopsi teknologi.
4. Mengintegrasikan Program dengan Kebijakan Nasional: bersama pihak terkait untuk mendukung materi terjemah kitab suci bahasa daerah masuk dalam materi pembelajaran muatan lokal dalam kurikulum Merdeka belajar.
5. Menyediakan Solusi Offline: adalah terjemah bahasa daerah versi cetak, Qur'an In Word dapat mengatasi keterbatasan jaringan internet.

Alternatif 2: Integrasi penerjemahan kitab suci dalam Media Pendidikan

Untuk menilai rekomendasi Puslitbang Lektur dalam membuat kebijakan Integrasi terjemah kitab suci dalam Media Pendidikan, dapat menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Dunn. Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan skoring antara lain:

1. Efektivitas Pelestarian Bahasa (30%) : Pendidikan formal memberikan dampak jangka panjang pada generasi muda dalam kurikulum pendidikan multikultural. Skor 8.
2. Dukungan Implementasi (25%) apabila sistem pendidikan sudah mapan dan dapat menjadi basis implementasi. Skor 8.
3. Keterjangkauan Biaya (20%), sangat rendah dan membebaskan anggaran pendidikan nasional karena memanfaatkan infrastruktur pendidikan dengan alokasi anggaran pendidikan tahunan. Skor 7.
4. Inovasi dan Relevansi Teknologi (15%), meningkatkan penggunaan media pembelajaran modern untuk meningkatkan literasi digital siswa melalui materi berbasis teknologi. Skor 6.
5. Dukungan Pemangku Kepentingan (10%), tantangan keterlibatan dari civitas akademika dan orang tua sangat menentukan. Skor 7

Kesimpulan : Berdasarkan skoring di atas maka alternatif kebijakan integrasi terjemah kitab suci dalam Media Pendidikan ini paling cocok untuk memberikan dasar pendidikan pelestarian bahasa daerah kepada generasi muda secara berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur sekolah dan pelatihan guru. Integrasi ini memerlukan kemitraan dengan pemerintah dan lembaga pendidikan swasta untuk mempercepat implementasi, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas.

Alternatif 3: Kolaborasi Antar-Lembaga

Untuk menilai rekomendasi Puslitbang Lektur dalam membuat kebijakan Kolaborasi Antar-Lembaga, dapat menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Dunn. Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan skoring antara lain:

1. Efektivitas Pelestarian Bahasa (30%) : Kolaborasi yang solid sangat efektif untuk memperluas cakupan pelestarian bahasa daerah. Skor 7
2. Dukungan Implementasi (25%), dukungan lintas sektor dapat meningkatkan keberhasilan implementasi di daerah. Skor 9
3. Keterjangkauan Biaya (20%), memperluas kesempatan pembiayaan *cost sharing* antar Kementerian/Lembaga. Skor 8
4. Inovasi dan Relevansi Teknologi (15%), perbedaan platform teknologi antar-lembaga dapat menghambat terwujudnya integrasi sistem teknologi. Skor 7
5. Dukungan Pemangku Kepentingan (10%), Dukungan luas dari berbagai pihak meningkatkan legitimasi kebijakan. Skor 9

Kesimpulan:

Berdasarkan skoring di atas maka alternatif kebijakan Kolaborasi Antar-Lembaga ini efektif untuk pelestarian bahasa daerah dengan cakupan yang luas karena melibatkan berbagai pihak. Namun, keberhasilannya memerlukan mekanisme koordinasi yang transparan dan efisien. Alternatif ini juga membutuhkan penguatan kapasitas lembaga dan penerapan teknologi digital untuk mengatasi tantangan birokrasi dan meningkatkan transparansi.

LAMPIRAN III

Solusi Penyelesaian Problem Statement

1. Puslitbang Lektur membuat kebijakan digitalisasi penerjemahan kitab suci bahasa daerah dengan Teknologi Inovatif dan relevan dengan melibatkan komunitas bahasa, tokoh agama dan budaya, ulama, pengembang teknologi Informasi.

Penerapan kebijakan ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan :

- **Penurunan Jumlah Penutur Bahasa Daerah**, dokumentasi digital memungkinkan bahasa daerah tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Teknologi memungkinkan akses lebih luas ke bahasa daerah, termasuk bagi mereka yang tinggal di luar daerah asal bahasa tersebut.
 - **Minimnya Program Revitalisasi Bahasa Daerah**: Platform digital dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran mandiri untuk mempelajari bahasa daerah. Mempermudah penciptaan konten baru yang relevan dalam bahasa daerah, seperti aplikasi atau game edukasi.
 - **Kesenjangan Akses Informasi**: Teknologi informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Bahasa daerah dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi populer, seperti navigasi atau asisten virtual, sehingga penggunaannya lebih kontekstual.
 - **Kurangnya Ketertarikan Generasi Muda**: Inovasi digital menarik perhatian generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Fitur interaktif seperti audio, video, dan animasi meningkatkan minat belajar bahasa daerah.
2. Puslitbang Lektur dalam membuat kebijakan Integrasi penerjemahan kitab suci dalam Media Pendidikan dengan melibatkan pemerintah dan lembaga pendidikan negeri dan swasta.

Dengan memanfaatkan kebijakan Integrasi ini, maka akan memberikan dasar yang kuat melalui integrasi bahasa daerah dalam sistem pendidikan formal:

- **Meningkatkan pemahaman dan penggunaan Bahasa Daerah**, karena dengan pendidikan formal memastikan bahasa daerah diajarkan secara sistematis kepada generasi muda, dan menjadikan bahasa daerah sebagai bagian dari rutinitas belajar, memperkuat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - **Meningkatnya Paparan Bahasa Daerah dalam Kurikulum**, karena Kurikulum berbasis budaya yang memasukkan terjemah Kitab suci dalam bahasa daerah, bukan hanya menyematkan bahasa daerah sebagai warisan budaya saja namun juga dalam konteks spiritual dan praktis.
 - **Memperkaya Sumber Belajar yang Relevan**: Penyediaan buku teks dan modul pembelajaran berbasis bahasa daerah mempermudah siswa untuk memahami konten dalam bahasa ibu mereka, serta menciptakan proses belajar-mengajar yang lebih personal dan efektif.
 - **Mendorong Kesadaran akan Pentingnya Bahasa Daerah**, program ini menanamkan nilai-nilai pelestarian budaya sejak dini, sehingga siswa memahami pentingnya menjaga bahasa daerah.
3. Puslitbang Lektur dalam membuat kebijakan Kolaborasi Antar-Lembaga dengan melibatkan pemerintah pusat (Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kemendikti Saintek, Kemenbud), pemerintah daerah, komunitas bahasa.

Dengan memanfaatkan kebijakan kolaborasi ini, maka akan mengoptimalkan sinergi antar-lembaga untuk cakupan yang lebih luas dan keberlanjutan program:

- Meningkatkan Koordinasi dalam Pelestarian Bahasa: Kolaborasi antar-lembaga menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk menghasilkan program yang lebih komprehensif, dan memastikan pelestarian bahasa daerah dilakukan secara menyeluruh.
- **Dapat memperoleh pendanaan untuk Program Revitalisasi** secara lebih baik karena pendanaan dari berbagai lembaga mengurangi beban biaya pada satu pihak dan lebih berkelanjutan.
- **Dokumentasi dan Data tentang Bahasa Daerah menjadi lebih baik, karena** Data yang terkumpul dapat digunakan untuk merancang program pelestarian yang berbasis bukti.
- **Kesenjangan Antar-Daerah dalam Pelestarian Bahasa:** tidak meratanya sumber daya pada setiap daerah menyebabkan kesenjangan itu, namun Lembaga lokal dapat berperan aktif dalam memastikan program pelestarian bahasa daerah yang relevan dengan kebutuhan daerah masing-masing, dan dapat menciptakan jangkauan yang lebih luas, termasuk ke daerah terpencil.
- **Kompleksitas Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan,** dapat diatasi dengan adanya platform digital untuk komunikasi antar-lembaga mempermudah koordinasi dan transparansi pelaksanaan program. Hal ini dapat menyederhanakan birokrasi dan mempercepat implementasi program pelestarian bahasa daerah.

